

# PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Moh. Rasyid**

*moh.rasyid.se@gmail.com*

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The aims of this research are: 1). To find out about general allocation funds, specific allocation funds, profit sharing funds, and local revenue on regional expenditure of regency/City in Central Sulawesi; 2) To explore simultaneous influence of general allocation funds, specific allocation funds, profit sharing funds, and local revenue on regional expenditure of regency/City in Central Sulawesi; 3) To explore partial influence of general allocation funds, specific allocation funds, profit sharing funds, and local revenue on regional expenditure of regency/City in Central Sulawesi. The research method is panel data regression with software Eviews 9.0. Sample consist of 11 regencies/Cities in Central Sulawesi Province in 2012-2014. The results find that general allocation funds, specific allocation funds, profit sharing funds, and local revenue have influenced regional expenditure Of 95.37%, While the remaining influenced by factors that are not studied. It also finds that general allocation funds, specific allocation funds, profit sharing funds, and local revenue have simultaneous influence on regional expenditure of regency/City in Central Sulawesi. Partially, general allocation funds and and local revenue have significant influence on regional expenditure in Central Sulawesi. This in indicated by the t-value higher than t-table or probability value is smaller than 5%.*

**Keywords:** *general allocation funds, specific allocation funds, profit sharing funds, local revenue and regional expenditure*

Melalui otonomi daerah, pembangunan daerah yang di lakukan oleh masyarakat lokal di pandang merupakan strategi atau cara yang paling efektif dibandingkan strategi pembangunan yang bersifat sentralistis yang di lakukan pusat (Juli Paranglima Saragih, 2003).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik Machfud, 2002).

Menurut Undang - undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), lain – lain pendapatan yang sah dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain -lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua

dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah.

Transfer antar pemerintah sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi *fiscal gap* merupakan salah satu sumber penerimaan penting pemerintah daerah. Pemberian transfer diharapkan dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadinya peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah. Tujuan utama dari pelaksanaan transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah (Oates dalam Haryo, 2007).

Pemberian transfer pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai Kebutuhan fiskal yang lebih besar dari pemberian transfer, yaitu dengan peningkatan upaya pemerintah daerah dalam penggalian sumber-sumber pembiayaan daerah terutama dari fiskal daerah. Namun, pemberian transfer juga mengakibatkan ketidak efektifan pembiayaan pengeluaran daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dengan menggali sumber-sumber PAD merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang efektivitas transfer pemerintah pusat kepada daerah. Oleh karena itu, pemberian transfer DAU, DAK dan DBH seharusnya disikapi pemerintahan daerah dengan upaya memacu pembangunan yang berkesinambungan dalam menciptakan kemandirian daerah dengan meningkatkan kapasitas fiskal untuk penenuhan kebutuhan fiskal daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu diikuti dengan pemberian inisiasi dari pemerintah dalam pengoptimalannya melalui kebijakan dan peraturan yang menguntungkan banyak pihak. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, sedangkan Dana Perimbangan merupakan transfer pemerintah

pusat kepada daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah menjadikan daerah semakin mandiri dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah maupun pembangunan daerahnya melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan sumber-sumber potensialnya. Pencapaian peningkatan pembangunan melalui kemandirian harus sesuai dengan asas *money follows function*, yaitu penyerahan kewenangan daerah diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru kepada daerah masing-masing di era desentralisasi fiskal (Waluyo, 2007).

Desentralisasi merupakan peluang bagi daerah dalam peningkatan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah yang ditandai dengan adanya penyerahan sumber-sumber pembiayaan. Dengan adanya desentralisasi fiskal berupa pemberian transfer yang telah berjalan delapan tahun, diharapkan daerah dapat meningkatkan potensi fiskal yang dapat mewujudkan kemandirian daerah.

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Nemec dan Wright, 1997). Tujuan utama dari implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah (Oates, 1999).

Tercapainya kemandirian daerah otonom merupakan harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun

ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan (Mardiasmo, 2002). Konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan sekarang ini menuntut setiap daerah untuk dapat mengembangkan dan mengelola daerahnya sendiri secara bebas dan tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat disetiap daerah.

Namun pada kenyataannya pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan fiskal daerah, tanpa berusaha mengoptimalkan, mengembangkan serta menggali sumber-sumber potensi pendapatan di daerahnya, kemudian oleh pemerintah daerah dana transfer (*grant*) dari pemerintah pusat dijadikan sebagai dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dan dimasukkan di perhitungan APBD. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah), dan ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper Effect* (Oates, 1999).

Salah satu tuntutan reformasi setelah era orde baru adalah permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan otonomi daerah yang desentralisasi fiskal, dimana sistem sentralisasi yang diterapkan di Indonesia menyebabkan intervensi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang terlalu besar, sehingga dengan besarnya intervensi ini menyebabkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah dalam mendanai setiap kebutuhan pengeluaran daerah maupun dalam pelayanan publik. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu mendapatkan pengaturan sedemikian rupa agar kebutuhan fiskal yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat

dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah serta pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dengan menggali sumber-sumber PAD merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang efektivitas transfer pemerintah pusat kepada daerah. Oleh karena itu, pemberian transfer seharusnya disikapi pemerintahan daerah dengan upaya memacu pembangunan yang berkesinambungan dalam menciptakan kemandirian daerah dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah perlu di ikuti dengan pemberian inisiasi dari pemerintah dalam pengoptimalannya melalui kebijakan dan peraturan yang menguntungkan banyak pihak. Oleh karenanya PAD diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan utama dan mencerminkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, sedangkan Dana Perimbangan merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan Fiskal daerah.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dengan melihat pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, bukan kemandirian yang terwujud, justru yang terlihat adalah adanya tingkat ketergantungan terhadap pusat yang semakin lama semakin besar dengan mengandalkan dana transfer, yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH fakta ini semakin diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa tingginya dana transfer dari tahun ke tahun dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiaya kebutuhan fiskal daerah, ini merupakan ketergantungan yang

tinggi akan dana transfer tersebut, dibandingkan dengan usaha untuk melakukan pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan atau penerimaan yang dapat membantu daerah dalam hal memenuhi kebutuhan fiskal/operasionalnya.

Fenomena tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat terlihat di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2012 kontribusi dana transfer terhadap Belanja Daerah mencapai 78,24% dari Tahun sebelumnya, kemudian menurun menjadi 72,78% pada tahun 2013 dan 69,46% tahun 2014. Sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah tahun 2012 hanya 10,55% dan mengalami peningkatan menjadi 10,86% tahun 2013 dan 13,31% tahun 2014.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah masih memiliki ketergantungan terhadap Belanja Daerah dan ini mengindikasikan yang mempengaruhi kemampuan yang diperkirakan mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Meskipun demikian, indikasi tersebut memerlukan pengujian dan pembuktian empiris dan hal tersebut menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini.

Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu dan data hasil observasi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*”.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana DAU, DAK, DBH dan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ?

## **METODE**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka jenis penelitian ini adalah verifikatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah pada kurun waktu 2012-2014.

Keseluruhan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan penelitian. Daerah-daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian (tahun 2012-2014) dan terdapat sebanyak 11 (sebelas) kabupaten yang memenuhi kriteria memiliki laporan keuangan lengkap selama kurun waktu penelitian.

Pada konteks penelitian ini, penulis membagi variabel *independen*/bebas (variabel X) kedalam 4 (empat) variabel dan satu variabel *dependen*/terikat (variabel Y).

Variabel *independen* (bebas) dalam penelitian ini yang terdiri dari Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ), Dana Bagi Hasil ( $X_3$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $X_4$ ) serta variabel *dependen* (terikat) yaitu Belanja Daerah ( $Y$ ) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang akan diukur dengan menggunakan skala rasio dan dengan operasionalisasi variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ), adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dana Bagi Hasil ( $X_3$ ), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Pendapatan Asli Daerah ( $X_4$ ), adalah merupakan sumber keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dari untuk periode tahun penelitian 2012-2014 yang digali dari dalam wilayah daerah dan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
5. Belanja Daerah ( $Y$ ). Menurut Halim (2002 :68), "Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran". Adapun Belanja Daerah yang menjadi Variabel devenden/terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Tahun Penelitian 2012-2014.

Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012-2014, maka penulis menggunakan analisis regresi data panel karena dapat mengukur pengaruh variabel bebas (*independen*) terhadap variabel terikat (*dependen*) pada periode atau kurun waktu tertentu. Menurut Widarjono (2013) ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data yaitu data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul sebagai akibat pengurangan variabel.

Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *pooled*, *fixed effect*, dan *random effect*, masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai oleh peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model yang tersedia. Data panel yang telah dikumpulkan, diregresikan dengan menggunakan model *pooled* dan model *fixed* terlebih dahulu. Setelah hasil dari model *pool* dan *fixed effect* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji *Likelihood Ratio*. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk memilih model yang paling tepat diantara model *pool* dan *fixed effect*. Jika model yang dipilih adalah model *fixed effect* maka selanjutnya melakukan regresi dengan model *random effect*, untuk menentukan model regresi panel

yang tepat. Untuk menentukan apakah model *Random-effects* atau *Fixed-effects* yang digunakan, kita harus membandingkan nilai *Uji Hausman* dengan nilai *Chi-Square*.

Uji ketepatan perkiraan ( $R^2$ ) dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi. Uji ini dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinan  $R^2$ , jika nilai  $R^2$  semakin besar atau mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat (Setiaji, 2004 dalam Idhamsya, 2011:50).

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independen* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen* ( $Y$ ). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel *dependen* (terikat) atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi).

F-hitung dapat dicari dengan bentuk formulasi rumus menurut Priyatno (2009:81) sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana:

F = Dari tabel distribusi F

$R^2$  = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel *independen*

n = Jumlah data atau kasus

Adapun kaidah pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah:

- Jika F-hitung > F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) atau  $P = 95\%$  maka dapat dibuktikan variabel *independen* (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Jika F-hitung < F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) atau  $P = 95\%$  maka dapat dibuktikan variabel

*independen* (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel *independen* ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* ( $Y$ ). Rumus t-hitung pada analisis regresi menurut Priyatno (2009:83) diformulasikan dengan bentuk persamaan matematis sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Dimana:

t = Diperoleh dari daftar tabel distribusi t

$b_i$  = Koefisien regresi variabel i

$S_{b_i}$  = Standar *error* variabel i

Adapun kaidah pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah:

- Jika t-hitung > t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) maka terbukti secara parsial variabel *independen*/bebas (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah,) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Jika t-hitung < t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) maka terbukti secara parsial variabel *independen*/bebas (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel *dependen* (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Hasil Penelitian**

**1.1. Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Berdasarkan Uji Hausman yang telah dilakukan, diperoleh model regresi data panel yang sesuai digunakan untuk memodelkan pengaruh DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap belanja daerah untuk 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2012-2014 mengikuti model *Random Effect*. Dimana model yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$\hat{y}_{it} = -15027949010,63 + 1,067564X_{1it} + 1,472763X_{2it} + 0,520612X_{3it} + 2,169396X_{4it}$$

Dimana :

$\hat{y}_{it}$  = nilai belanja daerah pemerintah untuk wilayah ke-i dan tahun ke-t

$X_{1it}$  = nilai DAU untuk wilayah ke-i dan tahun ke-t

$X_{2it}$  = nilai DAK untuk wilayah ke-i dan tahun ke-t

$X_{3it}$  = nilai DBH untuk wilayah ke-i dan tahun ke-t

$X_{4it}$  = nilai PAD untuk wilayah ke-i dan tahun ke-t

Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi data panel dengan model *Random Effect* dengan rincian hasil diformulasikan dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Hasil Uji Model *Random Effect***

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 02/24/17 Time: 05:33  
 Sample: 2012 2014  
 Included observations: 3  
 Cross-sections included: 11  
 Total pool (balanced) observations: 33  
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable               | Coefficient     | Std. Error     | t-Statistic | Prob.  |
|------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| C                      | -15027949010.63 | 48319135867.66 | -0.311014   | 0.7581 |
| X1?                    | 1.067564        | 0.118375       | 9.018468    | 0.0000 |
| X2?                    | 1.472763        | 0.808996       | 1.820481    | 0.0794 |
| X3?                    | 0.520612        | 0.568004       | 0.916566    | 0.3672 |
| X4?                    | 2.169396        | 0.265827       | 8.160941    | 0.0000 |
| Random Effects (Cross) |                 |                |             |        |
| _BANGKEP--C            | -1138491069.329 |                |             |        |
| _BANGGAI--C            | 300320231.8334  |                |             |        |
| _MOROWALI--C           | -564845584.2461 |                |             |        |
| _POSO--C               | 793519610.0378  |                |             |        |
| _DONGGALA--C           | 453992021.2213  |                |             |        |
| _TOLITOLI--C           | -1871973153.905 |                |             |        |
| _BUOL--C               | -1765493113.607 |                |             |        |
| _PARIMOU--C            | -501502069.0834 |                |             |        |
| _TOUNA--C              | 2841299920.172  |                |             |        |
| _SIGI--C               | 1028961012.038  |                |             |        |
| _PALU--C               | 424212194.8684  |                |             |        |
| Effects Specification  |                 |                |             |        |
|                        |                 | S.D.           | Rho         |        |
| Cross-section random   |                 | 6.72E+09       | 0.0205      |        |
| Idiosyncratic random   |                 | 4.64E+10       | 0.9795      |        |

Weighted Statistics

|                       |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared             | 0.953661 | Mean dependent var | 7.24E+11 |
| Adjusted R-squared    | 0.947041 | S.D. dependent var | 1.94E+11 |
| S.E. of regression    | 4.46E+10 | Sum squared resid  | 5.56E+22 |
| F-statistic           | 144.0592 | Durbin-Watson stat | 2.152262 |
| Prob(F-statistic)     | 0.000000 |                    |          |
| Unweighted Statistics |          |                    |          |
| R-squared             | 0.954798 | Mean dependent var | 7.46E+11 |
| Sum squared resid     | 5.66E+22 | Durbin-Watson stat | 2.116164 |

Sumber: Lampiran 6.

Koefisien konstanta yang bernilai negatif menunjukkan ketika variabel independen dianggap semuanya tetap maka belanja daerah menurun sebesar 15027949010,63. DAU, DAK, DBH dan PAD mempengaruhi kenaikan belanja daerah. Jika DAU meningkat satu satuan, belanja daerah akan meningkat sebesar 1,067564. Demikian pula dengan peningkatan satu satuan pada DAK juga akan meningkatkan belanja daerah sebesar 1,472763. Dana alokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pendapatan setiap provinsi dan untuk program-program tertentu sebagai bagian dari desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi.

Dana bagi hasil juga berpengaruh positif pada peningkatan belanja daerah. Jika dana bagi hasil meningkat sebesar satu satuan, belanja daerah akan meningkat sebesar 0,520612. Dana bagi hasil sebenarnya bersumber dari daerah melalui pembayaran pajak dan kepemilikan sumber daya alam kemudian dimasukkan ke dalam dana perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Jika dana bagi hasil semakin ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi regional di sebuah provinsi juga akan meningkat.

Peningkatan PAD sebesar satu satuan diakibatkan oleh belanja daerah yang semakin meningkat sebesar 2,169369. PAD yang merupakan salah satu wujud desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan menjadi salah

satu pilar desentralisasi sebagai penugasan pendapatan kurang mampu memenuhi belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Tetapi, jika kita mencermati besaran nilai PAD daerah kabupaten/ kota di Sulawesi Tengah mengalami suatu peningkatan. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah kuat, sehingga tidak tergantung PAD dari Pemerintah Pusat untuk membiayai alokasi untuk memenuhi belanja daerah.

Dari uji metode *random effect model* pada tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.953661 atau 95,37%. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa variabel independen yaitu DAU, DAK, DBH dan PAD mampu menjelaskan variabel dependen yaitu belanja daerah sebesar 95,37% sedangkan sisanya sebesar 14,63% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model yang diperoleh.

## 1.2. Hasil Pengujian Hipotesis

### a. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk menguji hipotesis pertama penelitian digunakan nilai uji-F untuk mengetahui sejauhmana variabel-

variabel *independen* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel *dependen*.

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 144,0592 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi  $< 5\%$  ( $\alpha 0,05$ ) dan F-hitung sebesar 10,063  $>$  F-tabel sebesar 1,53 yang artinya  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan untuk hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ , artinya hipotesis pertama penelitian secara ilmiah dapat dibuktikan kebenarannya.

#### **b. Hasil Uji Hipotesis Kedua**

Hipotesis kedua penelitian menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada nilai uji-t.

Nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ) sebesar 9,018468 lebih besar dari nilai t-tabel 2,776 atau nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan (bermakna), terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ) sebesar 1,820481 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,776 atau nilai signifikannya sebesar 0,0794 lebih besar dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada

pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai t-hitung variabel Dana Bagi Hasil ( $X_3$ ) sebesar 0,916566 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,766 atau nilai signifikannya sebesar 0,3762 lebih besar dari nilai  $\alpha 0,05$  di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Nilai t-hitung variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_4$ ) sebesar 8,160941 lebih besar dari nilai t-tabel 2,766 atau nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai taraf nyata 5% di tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha 0,05$ ). Hal ini memberikan makna secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan (bermakna), terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan untuk hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_i$ , artinya hipotesis kedua penelitian secara ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak semua variabel *independen* penelitian (DAU, DAK, DBH dan PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Pengaruh DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU, DAK, DBH dan PAD secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) dan Asrul Wisnu Setiawan (2015) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel *independen* dimana DAU, DAK dan DBH

termasuk didalam indikator dana perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, DAU, DAK dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH secara bersama-sama terhadap belanja modal adalah sebesar 52,1% berarti sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

### **2.2 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah**

Pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Holtz-eakin et.al (1985), Legrenzi dan Milas (2001), dan Halim (2006). Terbukti pula jika kita mencermati besaran nilai PAD daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mengalami suatu peningkatan. Tujuan awal DAU adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah kuat, sehingga tidak tergantung DAU dari Pemerintah Pusat untuk membiayai alokasi belanja modal daerah.

### **2.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah.**

Pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Holtz-Eakin et al (1995), yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

### **2.4 Pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2007). Menurut Carol (2005), Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mengatasi ketidak seimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional, mendorong pebcapaian peayanan dan standar minimum, dan merangsang mobilisasi pendapatan. Menurut Arbie (2013), Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Wahyuni dan Pryo, (2009) menyebutkan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)”. Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010), menyatakan bahwa dari hasil yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja daerah (BD) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

### 2.5. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

PAD juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerahnya sendiri melalui belanja modal, karena PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika PAD

naik maka belanja modal juga akan mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiardi dkk (2014) dan Arwati (2013) yang

menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah secara simultan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah secara parsial terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

### Rekomendasi

1. Melihat adanya fenomena tidak signifikannya pengaruh DAK dan DBH terhadap belanja daerah, maka sebaiknya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah lebih meningkatkan anggaran DAU, DAK dan DBH yang di proporsikan ke anggaran belanja modal.
2. Melihat pengaruh DAU dan PAD sangat signifikan terhadap Belanja Daerah maka sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih mengoptimalkan lagi penggalan sumber-sumberdaya alam yang potensial memberikan kontribusi pada PAD Kabupaten/Kota.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel *independen* lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah

lainnya yang lebih besar kontribusinya terhadap belanja daerah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Muslimin, S.E., M.M selaku Ketua Tim Pembimbing dan Bapak Dr. Muhammad Yunus Kasim, S.E., M.Si selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan tesis ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Arwati, Dini & Hadiati, Novita (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*. ISBN: 979-26-0266
- Colfer, Carol J Pierce & Capistrano, Doris. 2005. *Politik Desentralisasi, Kekuasaan dan Pengalaman di Berbagai Negara*. Jakarta.
- Dedi Nordiawan dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Fisher, Ronald C. 1996. *States an Local Public Finace: Institution, Theiry, and Policy*, 2<sup>nd</sup> edition Burr Ridge, Illinois : Richard D. Irwin Incorporated
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul; Nasir, Jamal Abdul. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. Manajemen Usahawan Indonesia No. 06/Th. XXXV Juni 2006.
- Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1985. *Intempora Analysis of StateA Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159 – 174.
- Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1994. *Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159 – 174
- Juli Paranglima Saragih, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi*. Penerbit: Ghalia Indonesia
- Legrenzi, Gabriella & Costas Millas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue - Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nemec, J. dan G. Wright, (Ed.), (1997), *Public Finance: Theory and Practice in Central European Transition*, Osnovy, Kiev.
- Oates Wallace. 1999. *An Essay On Fiscal Federalism*. *Journal Of Economic Literature* 37: 1120-1149.
- Oates, Haryo, 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan*
- Priyatno Dwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta: Andi
- Setiaji, Bambang, 2004. *Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif*. Surakarta: Program Pascasarjana UMS, 2004.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta.
- Sugiharti, Ni Putu & Supadmi, Ni Luh. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*

*Universitas Udayana* 7.2: 477-495/  
ISSN : 2302-8556.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Wahyuni, dan Priyo Hari Adi. 2009. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya, 10 Oktober 2009.

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 6 Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wandira, Arbie Gugugs. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765

Widarjono. Agus, (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)